



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

REVIEW PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2014-2019

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL

JL. Gatot Subroto, Komplek Terminal Dukuhsalam

Telp. (0283) 4561191 Fax. (0283) 4561377 - Slawi 52412

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tegal di bidang teknis lalu lintas dan keselamatan jalan, angkutan jalan dan terminal, perkeretaapian, dan pelayaran, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dari Tahun 2014 sampai 2019. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat

daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. U

ntuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal . Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal No Tahun 2017.

Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu melakukan review Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Intrepretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Review Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang di bidang teknis lalu lintas dan keselamatan jalan, angkutan jalan dan terminal, perkeretaapian, dan pelayaran, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, merupakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Review Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Review Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Review Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2014-2019 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 dilakukan dalam tahapan penyusunan

Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke depan masa Renstra yang akan diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam

melaksanakan urusan wajib di bidang Perhubungan, sesuai dengan Perda Kabupaten Tegal no 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. Melaksanakan perubahan pembagian urusan daerah sebagaimana ketentuan dalam UU no 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah no 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang..

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar hukum pembentukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang perhubungan
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan.

KEWENANGAN :

- a. Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan,

- pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan untuk jaringan jalan dalam kabupaten;
- b. Penyediaan perlengkapan jalan meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Penerangan Jalan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Alat Pengendali Pemakai Jalan, Alat Pengaman Pengguna Jalan dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan serta fasilitas pendukung penyelenggaraan di jalan daerah kabupaten kecuali jalan desa;
 - c. Penetapan rencana penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - d. Penetapan tingkat pelayanan jalan kabupaten;
 - e. Penilaian, Persetujuan dan Pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) pada jalan Kabupaten;
 - f. Penetapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
 - g. Pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum pada bahu jalan dalam daerah Kabupaten;
 - h. Penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - i. Pemeriksaan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - j. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
 - k. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;

- l. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
- m. Penataan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- n. Penataan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- o. Penataan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten;
- p. Penertiban rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- q. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- r. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- s. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten;
- t. Penyelenggaraan angkutan perintis dalam Kabupaten;
- u. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
- v. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan latihan mengemudi;

- w. Perencanaan, penetapan, simpul, lokasi, penetapan terminal penumpang tipe C, pembangunan sarana dan prasarana serta sistem informasi;
- x. Penetapan standar operasional prosedur pengoperasionalan terminal penumpang tipe C;
- y. Penetapan standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang tipe C;
- z. Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal penumpang tipe C;
- aa. Penetapan dan pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan barang;
- bb. Penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kabupaten;
- cc. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- dd. Manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- ee. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- ff. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- gg. Promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- hh. Pembinaan dan pengawasan penilaian fisik kendaraan bermotor milik pemerintah;
- ii. Pengawasan kelaikan kendaraan bermotor;
- jj. Penetapan manajemen perkeretaapian pada perlintasan sebidang dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;

- kk. Penetapan kebijakan perlintasan sebidang pada jaringan jalan dan gerakan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut di dalam daerah Kabupaten;
- ll. Pengelolaan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada perlintasan sebidang, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- mm. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perlintasan sebidang, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- nn. Penyediaan perlengkapan jalan pada lokasi perlintasan sebidang yang meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu Lalu Lintas, alat pengaman perlintasan sebidang untuk pengguna jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas pada perlintasan sebidang yang berada di jalan dalam daerah Kabupaten;
- oo. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- pp. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- qq. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten;
- rr. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau sesuai

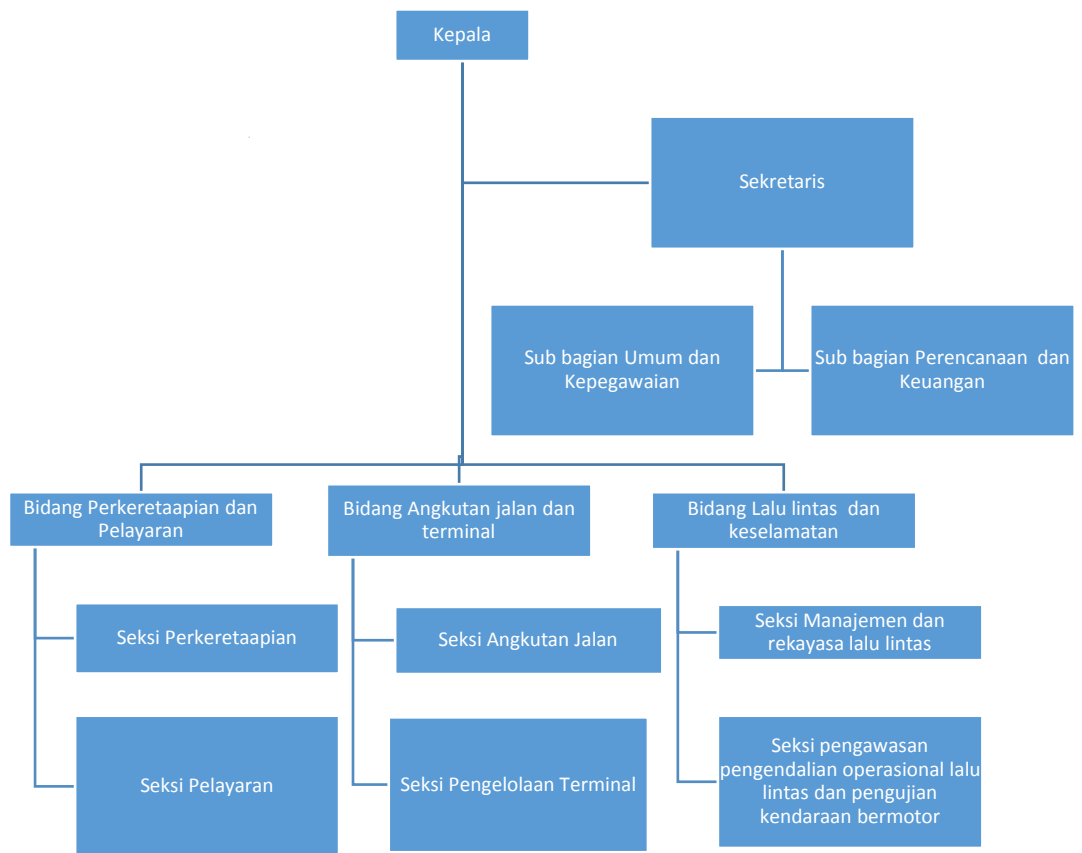
- dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
- ss. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten;
 - tt. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;
 - uu. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - vv. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
 - ww. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - xx. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
 - yy. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul lokal;
 - aaa. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - bbb. Pembangunan, pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan lokal;
 - ccc. Pembangunan dan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

- ddd. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- eee. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- fff. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- ggg. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- hhh. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- iii. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- jjj. Pengawasan kelaikan, pengawasan dan pemeriksaan permesinan kapal ukuran kurang dari 7 GT;
- kkk. Penerbitan Pas Kecil Kapal Ukuran Kurang dari 7 GT;
- lll. Melaksanakan fungsi penjagaan dan penyelamatan pada pelabuhan pengumpan dan pengumpul lokal;
- mmm. Pembinaan peningkatan kecakapan bagi awak kapal dan pemimpin kapal ukuran kurang dari 7 GT;
- nnn. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan dinas.

2.1.2 Struktur organisasi Dinas Perhubungan

Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah

Kepala sebagai pucuk pimpinan atau top management (pemangku jabatan top manager) pada Dinas Perhubungan. Unsur kepala dijabat oleh seorang pejabat dengan eselonering II/b. Di bawah kepala secara hierarkhi dan mencerminkan jalur komando terdapat empat unsur pimpinan dengan eselonering tiga dan merupakan unsur manajemen tingkat menengah (middle manager sebagai pemangku jabatan). Keempat unsur itu adalah Sekretariat dijabat seorang Sekretaris, Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran, yang masing-masing dijabat oleh Kepala Bidang. Masing-masing tingkatan manajemen itu membawahi manajemen tingkat bawah (lower management) yang secara berturut-turut adalah Bagian Sekretariat membawahi sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan membawahi Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal membawahi Seksi Angkutan Jalan dan Seksi Pengelolaan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran membawahi Seksi Perkeretaapian dan Seksi Pelayaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun secara lebih jelas susunan atau struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibawah ini :



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan jalan
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Bidang Angkutan Jalan dan Terminal
 - Seksi Angkutan Jalan
 - Seksi Pengelolaan Terminal

5. Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran
 - Seksi Perkeretaapian
 - Seksi Pelayaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Penguji Kendaraan Bermotor

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu :

Sumber Daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Per bulan September 2017 yaitu :

- Jumlah PNS : 67 orang
- Jumlah PTT : 1 orang
- Jumlah PHL : 82 orang
- Jumlah Petugas Jaga Lintas KA : 97 orang
- PENDIDIKAN PNS :
 - S - 2 : 6 orang
 - S - 1/D-IV : 15 orang
 - D – III : 4 orang
 - D – II/SMA : 32 orang
 - SLTP : 10 orang
 - SD/MI : - orang

67 orang
- PANGKAT DAN GOLONGAN :

- Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 28 orang
 - Golongan II : 28 orang
 - Golongan I : 6 orang
- 67 orang**

• JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL :

- Pejabat Struktural : 12 orang
- Pejabat Fungsional : 3 orang

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV c	1
2	Sekretaris	IV b	1
3	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan	IV a	1
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	IV a	1
5	Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran	IV b	1
6	Kapala Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	III d	1
7	Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	III d	1
8	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	III c	1
9	Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor	III d	1

10	Kepala Seksi Angkutan Jalan	III d	1
11	Kepala Seksi Pengelolaan Terminal	III d	1
12	Kepala Seksi Pelayaran	III c	1
13	Staf		54

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

- Sarana dan Prasarana

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
2. Aset Tetap	<u>Rp 37.047.137.003</u>	<u>Rp 24.281.529.503</u>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemkab Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dulu

Dishubkominfo) Kab.Tegal per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2015 (Rp.)
a. Tanah	768.000.000,00	0,00	0,00	768.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	16.827.922.350	921.434.300	0,00	15.906.488.050,00
c. Gedung & Bangunan	36.204.795.886	11.844.173.200	0,00	24.360.622.686,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	1.986.409.240	0,00	0,00	1.986.409.240,00
e. Aset Tetap Lainnya	154.634.000,00	0,00	0,00	154.634.000,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Penyusutan	(21.872.415.821)	0,00	0,00	(18.894.624.473)
Jumlah Aset Tetap	34.069.345.655	12.765.607.500	0,00	24.281.529.503

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 768.000.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 768.000.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar 16.827.922.350 meningkat sebesar Rp 921.434.300. dengan saldo tahun 2015 sebesar Rp 15.906.488.050. Perubahan angka tersebut terjadi karena adanya penambahan dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 921.434.300

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar 36.204.795.886 meningkat sebesar Rp11.844.173.200 dibandingkan saldo TA 2015 sebesar Rp 24.360.622.686,00. Pada tahun 2016 terdapat belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 12.298.464.000,00 namun dalam neraca hanya dicatat sebesar Rp 11.844.173.200,00. Terdapat selisih sebesar Rp 454.290.800,00 antara belanja di neraca dengan belanja di LRA, hal tersebut terjadi karena kesalahan dalam penganggaran. Terdapat 3 belanja yang dianggap belanja modal sebesar Rp 454.290.800,00 yang dikeluarkan dari rekening belanja modal gedung dan bangunan karena belanja tersebut lebih tepat dicatat sebagai belanja barang jasa. Belanja tersebut adalah :

- Belanja Traffic Cone sebesar Rp 167.032.000,-
- Belanja Marka Jalan sebesar Rp. 192.108.000,-
- Belanja Kerucut lalu lintas sebesar Rp. 95.150.000,

Ringkasannya Pengurangan aset gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH	SALDO
Saldo Awal neraca 2015	24.360.622.686	24.360.622.686
Belanja 2016	12.298.464.000	36.659.086.686
Pengurangan		
Belanja Traffic cone	167.032.000	36.659.086.686

Belanja Marka Jalan	192.108.000	36.659.086.686
Belanja Kerucut lal lintas	95.150.000	36.659.086.686
Saldo Akhir Neraca 2016		36.659.086.686

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.986.409.240,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2015. Hal itu terjadi karena pada tahun 2016 tidak ada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.154.634.000,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2015.

f. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp (21.872.415.821,-) dan Rp (18.894.624.473).

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja yang difokuskan pada 4 program utama yaitu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas seperti tersaji dalam tabel T.C-23 berikut:

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Target Kinerja Sesuai Tugas Fungsi PD	Target RPJMD 2019	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Prosentase Realisasi Tahun 2016 (Realisasi 2016/Target 2016*100)	Realisasi sd. Tahun 2016 (Realisasi 2015-2016)	Prosentase Realisasi dibanding target 2019 (Realisasi 2016/Target 2019*100)
	Indikator Program (Bab VIII RPJMD)								
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	74	99.61	75	96.8	129	98.205	124.10
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	74	99.17	75	91.95	123	95.56	117.88
3	Program peningkatan pelayanan angkutan								
	Persentase AKDP berijin	100%	80%	90	85%	90	106	90	90.00
	Prosentase kendaraan umum yang diuji KIR (%)	67.00	55.00	103.86	58.00	103.29	178	103.575	104.50
4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.								

Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	74	97.72	75	98.66	132	98.19	126.49
--	----	----	-------	----	-------	-----	-------	--------

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Persentase sarana perhubungan berfungsi baik

Target RPJMD tahun 2019 sebesar 78 %, sedangkan pada tahun 2015 dari target 74 % realisasi sebesar 99,81 %, dan tahun 2016 dari target sebesar 76 % realisasi pencapaian target sebesar 96,80 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan berhasil.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada program ini antara lain : Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Persentase sarana perhubungan berfungsi baik

Target RPJMD tahun 2019 sebesar 78 %, sedangkan pada tahun 2015 dari target 74 % realisasi sebesar 99,17 %, dan tahun 2016 dari target sebesar 76 % realisasi pencapaian target sebesar 91,60 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ berhasil.

Kegiatan –kegiatan yang dilakukan pada program ini antara lain : Rehabilitasi pemeliharaan Sarana Pegujian Kendaraan Bermotor dan Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan

Program peningkatan pelayanan angkutan

- Persentase AKDP berijin

Target RPJMD tahun 2019 sebesar 78 %, sedangkan pada tahun 2015 dari target 100 % realisasi sebesar 85 %, dan tahun 2016 dari target sebesar 90 % realisasi pencapaian target sebesar 85 %. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa Program Program peningkatan pelayanan angkutan cukup berhasil meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Persentase kendaraan umum yang diuji KIR (%)

Target RPJMD tahun 2019 sebesar 67 %, sedangkan pada tahun 2015 dari target 55 % realisasi sebesar 103,86 %, dan tahun 2016 dari target sebesar 76 % realisasi pencapaian target sebesar 103,29 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Prosentase kendaraan umum yang diuji KIR (%) berhasil.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program ini antara lain : Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan, Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan, Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

- Persentase sarana perhubungan berfungsi baik

Target RPJMD tahun 2019 sebesar 78 %, sedangkan pada tahun 2015 dari target 74 % realisasi sebesar 97,72 %, dan tahun 2016 dari target sebesar 76 % realisasi pencapaian target sebesar 98,66 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas berhasil

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program ini antara lain : Pengadaan Rambu-rambu lalu lntas, pengadaan marka jalan, pengadaan pagar pengaman jalan,pengadaan dan pemasangan warning light, pengadaan dan pemasangan trafic light, pengadaan dan pemasangan voice horn, pengadaan kerucut lalu linta (traffic cone), pengadaan rambu

prtabel, pengadaan dan pemasangan paku jalan, pengadaan water barrier, pengadaan dan pemasangan rambu penunjuk arah, papan parkir dan ZOSS, pengadaan dan pemasangan rambu peringatan dini perlintasan sebidang

Di bawah ini beberapa hasil yang dicapai dapat kami sampaikan pada Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2016, serta Rencana pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2017- 2019 dapat dilihat pada tabel T-C.24. berikut :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
2015-2019 :

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015
1	2	3	4	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	57,000,000	55,098,850	96.67
1	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	2,000,000	1,750,000	87.50
2	Penyelenggaraan Forum SKPD	5,000,000	4,900,000	98.00
3	Review DED	50,000,000	48,448,850	96.90
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,307,142,000	1,098,191,608	84.01
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,275,000	91.00
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	456,500,000	358,573,242	78.55
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	134,114,000	111,344,000	83.02
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000	148,888,581	74.44
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (PTT)	39,828,000	29,106,000	73.08
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	48,028,285	96.06
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	391,700,000	368,326,500	94.03
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00
12	Penyediaan Peralatan rumah tangga	7,500,000	7,500,000	100.00

13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	9,150,000	91.50
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,175,000,000	5,863,701,373	94.96
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	70,000,000	65,952,000	94.22
15	Pengadaan Mebelair	20,000,000	19,652,500	98.26
16	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	50,000,000	48,000,500	96.00
17	Pemasangan Listrik Gedung kantor	100,000,000	98,612,000	98.61
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	50,000,000	49,860,000	99.72
19	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	180,000,000	177,606,073	98.67
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	115,000,000	112,792,200	98.08
21	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00
22	Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji	5,500,000,000	5,203,160,200	94.60
23	Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Menara dan Alat Ukur Radiasi	75,000,000	73,065,900	97.42
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	26,249,950	87.50
24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30,000,000	26,249,950	87.50
	Program Peningkatan Pengembangan/Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	37,000,000	36,747,500	99.32
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	1,750,000	87.50
26	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	30,000,000	29,999,500	100.00
27	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	5,000,000	4,998,000	99.96
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	613,940,000	611,551,165	99.61
28	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	613,940,000	611,551,165	99.61

	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	280,000,000	277,669,000	99.17
29	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	280,000,000	277,669,000	99.17
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	720,000,000	627,707,750	87.18
30	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	80,000,000	29,997,500	37.50
31	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	500,000,000	465,561,250	93.11
32	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	25,000,000	23,200,000	92.80
33	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	25,000,000	25,000,000	100.00
34	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	55,000,000	48,949,000	89.00
35	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	35,000,000	35,000,000	100.00
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10,000,000	9,972,500	99.73
36	Penyelenggaraan pameran investasi	10,000,000	9,972,500	99.73
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	85,000,000	81,293,900	95.64
37	Pengendalian keamanan lingkungan	85,000,000	81,293,900	95.64
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	670,900,000	616,100,600	91.83
38	Peningkatan manajemen investasi daerah	15,000,000	14,655,600	97.70
39	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	655,900,000	601,445,000	91.70
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	30,000,000	29,980,000	99.93
40	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	30,000,000	29,980,000	99.93
	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	402,930,000	379,706,375	94.24
41	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	150,000,000	146,489,100	97.66

42	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	15,000,000	14,758,000	98.39
43	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal	100,000,000	98,803,175	98.80
44	Pengadaan Peralatan Video LPPL	137,930,000	119,656,100	86.75
	Program kerjasama Informasi dan Media massa	671,370,000	606,856,850	90.39
45	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	385,000,000	333,296,000	86.57
46	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	62,000,000	61,123,000	98.59
47	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	25,000,000	17,916,000	71.66
48	Pengadaan Peralatan Video Convergence	199,370,000	194,521,850	97.57
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	200,000,000	189,670,568	94.84
49	Pengurangan Terminal Maribaya	200,000,000	189,670,568	94.84
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,585,000,000	2,525,934,550	97.72
50	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	300,000,000	292,144,300	97.38
51	Pengadaan Marka jalan dan pemasangan paku jalan	400,000,000	397,707,600	99.43
52	Pengadaan Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) dan Watter Barrier	275,000,000	247,561,000	90.02
53	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penunjuk Arah, Papan Parkir dan ZOSS	1,010,000,000	994,178,700	98.43
54	Pemasangan Rambu Jalan Standar di Kecamatan Lebaksiu	200,000,000	198,501,500	99.25
55	Pengadaan Traffic Light Wilayah Pantura	200,000,000	198,200,250	99.10
56	Pengadaan dan Pemasangan Peringatan Dini Perlintasan Sebidang (PDPS)	200,000,000	197,641,200	98.82
J U M L A H		13,875,282,000	13,036,432,539	93.95

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2016

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Prosentase realisasi anggaran pada Tahun 2016
1	2	3	4	5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG	20,965,722,000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9,000,000	8,945,000	99.39
1	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	2,000,000	2,000,000	100.00
2	Penyelenggaraan Forum SKPD	7,000,000	6,945,000	99.21
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,360,064,000	1,155,672,149	84.97
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,498,350	99.93
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580,450,000	437,160,244	75.31
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20,000,000	16,874,800	84.37
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	49,025,805	98.05
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	450,500,000	398,914,285	88.55
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr.	15,000,000	13,800,000	92.00
9	Penyediaan Peralatan rumah tangga	7,500,000	7,497,500	99.97
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	100.00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	109,114,000	104,902,000	96.14
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	115,000,000	114,999,165	100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,075,000,000	1,007,153,302	93.69
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	450,000,000	447,988,000	99.55
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50,000,000	49,854,800	99.71
15	Pengadaan Mebelair	120,000,000	118,345,000	98.62
16	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	75,000,000	69,555,000	92.74
17	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	140,000,000	133,330,000	95.24
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	190,000,000	140,665,502	74.03

19	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	23,710,000	94.84
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	23,705,000	94.82
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	41,888,190	83.78
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	41,888,190	83.78
	Program Peningkatan Pengembangn/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	63,740,000	63,740,000	100.00
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,740,000	2,740,000	100.00
23	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	51,000,000	51,000,000	100.00
24	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	10,000,000	10,000,000	100.00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,046,018,000	1,012,547,530	96.80
25	Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan fasilitasi perhubungan.	1,021,018,000	990,513,530	97.01
26	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	25,000,000	22,034,000	88.14
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	300,000,000	274,956,500	91.65
27	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	150,000,000	129,003,500	86.00
28	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	150,000,000	145,953,000	97.30
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	867,500,000	841,522,000	97.01
29	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	60,000,000	52,510,000	87.52
30	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	40,000,000	40,000,000	100.00
31	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	30,000,000	30,000,000	100.00
32	Pengadaan Palang Pintu KA Maribaya dan Kesuben	40,000,000	39,500,000	98.75
33	Pembangunan Gardu Pos Palang Pinta KA Maribaya dan Perlintasan sebidang Kesuben	160,000,000	158,998,000	99.37
34	Pengadaan Alat Komunikasi (HT) untuk Petugas palang Pintu Perlintasan Sebidang	32,500,000	32,108,000	98.79
35	Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang	30,000,000	29,115,000	97.05

36	Pemeliharaan Pos Gardu PJJ dan Palang Pintu PJJ (Petugas Jaga Lintasan)	25,000,000	22,952,000	91.81
37	Pembangunan Gardu Pos Palang Pintu KA	450,000,000	436,339,000	96.96
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	12,000,000,000	9,244,157,600	77.03
38	Pembangunan Terminal Dukuhsalam	10,000,000,000	9,194,707,600	91.95
39	Pembangunan Terminal Yomani	2,000,000,000	49,450,000	2.47
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,380,000,000	2,348,096,400	98.66
40	Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas	200,000,000	197,727,500	98.86
41	Pengadaan Marka Jalan	775,000,000	772,167,500	99.63
42	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	200,000,000	198,396,000	99.20
43	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	250,000,000	241,834,600	96.73
44	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	300,000,000	291,941,000	97.31
45	Pengadaan dan Pemasangan Voice Horn	200,000,000	198,876,000	99.44
46	Pengadaan Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	275,000,000	269,884,800	98.14
47	Pengadaan Rambu Portabel RPPJ	180,000,000	177,269,000	98.48
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10,200,000	10,200,000	100.00
48	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10,200,000	10,200,000	100.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	920,000,000	776,401,300	84.39
49	Infensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	920,000,000	776,401,300	84.39
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	30,000,000	29,960,000	99.87
50	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	30,000,000	29,960,000	99.87
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	380,000,000	358,880,138	94.44
51	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	150,000,000	144,887,900	96.59
52	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	30,000,000	29,878,000	99.59
53	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal	150,000,000	137,798,363	91.87
54	Monitoring evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi	50,000,000	46,315,875	92.63
	Program Kerjasama Informasi dengan	424,200,000	415,283,700	97.90

	Media Massa			
55	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	337,200,000	329,753,000	97.79
56	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	62,000,000	61,749,700	99.60
57	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	25,000,000	23,781,000	95.12
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	50,000,000	48,928,850	97.86
58	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Menara Telekomunikasi (SIMDAMENDEL)	50,000,000	48,928,850	97.86
J U M L A H		20,965,722,000	17,638,332,659	84.13

Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2017-2019

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2017	Rencana Anggaran pada Tahun 2018	Rencana Anggaran pada Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG	6,170,340,000		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,248,804,000	958,500,000	1,106,500,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330,000,000	225,000,000	250,000,000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20,360,000	21,000,000	25,000,000
4	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	414,000,000	400,000,000	420,000,000
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	115,000,000	20,000,000	30,000,000
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	7,500,000	7,500,000	7,500,000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	6,500,000	6,500,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	109,114,000	106,000,000	115,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190,330,000	120,000,000	200,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan	1,247,830,00	720,120,000	6,710,000,000

	Prasarana Aparatur	0		
11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	0	65,000,000	75,000,000
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	136,490,000	0	0
13	Pengadaan mebeleur	100,000,000	0	0
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	351,340,000	360,120,000	390,000,000
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210,000,000	170,000,000	170,000,000
16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	25,000,000
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000	25,000,000	25,000,000
18	Penataan Gedung kantor	200,000,000	0	25,000,000
19	Rehabilitasi Gedung Kantor	200,000,000	0	0
20	DED Gedung Kantor	0	75,000,000	0
21	Pembangunan Gedung kantor Dishub	0	0	6,000,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70,000,000	30,000,000	75,000,000
22	Pendidikan dan pelatihan formal	70,000,000	30,000,000	75,000,000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,358,000	53,500,000	63,500,000
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,358,000	3,500,000	3,500,000
24	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	47,000,000	50,000,000	60,000,000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,997,980,000	2,982,500,000	2,800,000,000
25	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1,267,980,000	1,597,500,000	1,900,000,000
26	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	30,000,000	35,000,000	50,000,000
27	Penyempurnaan Terminal Dukuhsalam	700,000,000	0	0
28	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	30,000,000	30,000,000
29	Pendataan dan Monitoring Pelayaran	0	20,000,000	20,000,000
30	Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam	0	500,000,000	500,000,000
31	Penataan Lingkungan Terminal Adiwerna	0	750,000,000	300,000,000
32	Penyusunan naskah kajian akademis dan draft KAK perda Perhubungan	0	50,000,000	0
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10,200,000	10,000,000	12,000,000
33	Penyelenggaraan pameran investasi	10,200,000	10,000,000	12,000,000
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	496,340,000	550,000,000	650,000,000

34	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	193,420,000	250,000,000	300,000,000
35	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	282,920,000	300,000,000	350,000,000
36	Biaya bongkar pasang rambu/warning text perlintasan sebidang kereta api Klonengan/Prupuk Margasari	20,000,000	0	0
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1,254,660,000	855,000,000	815,000,000
37	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	40,000,000	40,000,000	40,000,000
38	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	174,100,000	50,000,000	50,000,000
39	Forum LLAJ	0	75,000,000	75,000,000
40	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	120,560,000	150,000,000	150,000,000
41	Pembangunan Gardu dan Palang Pintu KA Maribaya- Purwahamba- Kramat	190,000,000	0	0
42	Pengadaan palang pintu KA Jalan Amangkurat, Lemahduwur Adiwerna	200,000,000	0	0
43	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	30,000,000	20,000,000	20,000,000
44	Pemeliharaan pos gardu PJJ dan palang pintu PJJ (Petugas Jaga Lintasan)	25,000,000	50,000,000	50,000,000
45	Pengadaan Gardu Palang Pintu KA	0	150,000,000	150,000,000
46	Monitoring, evaluasi Andalalin	30,000,000	0	0
47	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	50,000,000	60,000,000	60,000,000
48	Kajian angkutan Taksi Kabupaten Tegal	50,000,000	0	0
49	Pengadaan palang pintu perlintasan sebidang rel ka untuk 4 pos kab tegal	80,000,000	50,000,000	50,000,000
50	Sosialisasi Pengalihfungsian terminal Slawi ke Terminal Dukuhsalam dan Adiwerna	50,000,000	0	0
51	Re-Routing Trayek Angkutan Pedesaan yang bersinggungan jalur di terminal Slawi dan Adiwerna	50,000,000	0	0
52	Monitoring dan Pengawasan dan Pendataan Kapal Pelaku Usaha Jasa Pelayaran	15,000,000	0	0
53	Pengadaan HT, Repeater dan Rig	150,000,000	0	0
54	Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	0	60,000,000	20,000,000
55	Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte)	0	50,000,000	50,000,000

56	Pengadaan dan pemasangan Alat Perlengkapan Jalan pada Perlintasan Sebidang	0	100,000,000	100,000,000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	248,480,000	250,000,000	250,000,000
57	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	248,480,000	250,000,000	250,000,000
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2,521,900,000	400,000,000	400,000,000
58	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas	400,000,000	0	0
59	Pengadaan marka jalan	400,000,000	0	0
60	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	360,000,000	0	0
61	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	261,900,000	0	0
62	Pengadaan dan Pemasangan Guardraill	200,000,000	0	400,000,000
63	Pemasangan Guardraill Jalan Pagongan-Wangandawa	0	200,000,000	0
64	Pembangunan Guardraill /pagar Pengaman Jalan Sungai Bengele- Dukuhalang	0	200,000,000	0
65	Pengadaan dan Pemasangan Paku jalan	400,000,000	0	0
66	Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (DAK)	200,000,000	0	0
67	Pembangunan Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	300,000,000	0	0
	Program perencanaan pembangunan daerah	24,828,000	13,000,000	13,000,000
68	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	5,000,000	5,000,000	5,000,000
69	Penyelenggaraan forum SKPD	7,828,000	8,000,000	8,000,000
70	Review Renstra	12,000,000	0	0
	Program pembinaan & pengemb.bid. kelistrikan	-	7.100,000,000	8.000,000,000
71	Operasional Pemeliharaan LPJU	0	1,500,000,000	2.000,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kab Tegal	0	5.600.000.000	6,000,000,000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	45,000,000	45,000,000	60,000,000
72	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	45,000,000	45,000,000	60,000,000
J U M L A H		9,216,380,000	13,967,620,000	20,455,000,000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah:

Tantangan permasalahan utama di Dinas Perhubungan dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan jasa transportasi;
- b. Terbatasnya jumlah SDM transportasi yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya;
- c. Perkembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi;
- d. Human error, merupakan faktor dominan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan OPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum Undang - Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Tersedianya landasan hukum Perda Kab. Tegal No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Tersedianya Sarana dan Fasilitas Perhubungan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibagi menjadi 2 yaitu : - Permasalahan yang bersifat positif (faktor pendorong) dan - permasalahan yang bersifat negatif (faktor penghambat) antara lain :

Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelayanan publik

No	Jenis pelayanan publik	Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub	Sebagai faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Sarana dan prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan (organda)	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi
2	Penyusunan program dan rencana kegiatan	Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sektor dan lintas wilayah	Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan berlalu lintas	Penyusunan program dilaksanakan per sektoral dan tidak terpadu
3	Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas	Masih kurangnya jumlah dan jenis fasilitas keselamatan lalu lintas	Menciptakan keteriban berlalu lintas	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi
4	Terbatasnya Sumber	Masih kurangnya jumlah PNS	Dibukanya formasi PNS	Alokasi anggaran yang

	Daya Manusia di bidang Perhubungan	bidang Perhubungan	untuk bidang Perhubungan	masih belum mencukupi
--	------------------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera; Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.;
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan adalah ***misi kedua*** yaitu :

- Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dituntut untuk mampu mengejawantahkan visi dan misi tersebut melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tegal nomor 71 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan keselamatan jalan, bidang angkutan jalan dan terminal, bidang perkeretaapian dan pelayaran
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan.

Hasil telaah terhadap RPJMD Kabupaten Tegal

No	Isu strategis RPJMD	Program prioritas RPJMD
1	Penguatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH

Sesuai dengan Visi Kementerian Perhubungan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dan misinya :

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;

Serta Visi Dinas Perhubunga Propinsi Jawa Tengah : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" dan misinya Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah

lingkungan. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2014-2019 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada tabel bawah ini :

No	Jenis kegiatan Dishub yang terkait dengan tata ruang	Kesesuaian dengan tata ruang		Keterangan
		Ya	-	
1	Peningkatan prasarana lalu lintas jalan	Ya	-	
2	Penyediaan sarana angkutan jalan	Ya	-	

3	Optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum	Ya	-	
4	Pembangunan terminal Dukuhalam	Ya	-	
5	Intensifikasi ketertiban lalin melalui penerapan ANDALALIN (Analisa Dampak Lingkungan)	Ya	-	
6	Pengembangan sarana transportasi kereta api	Ya	-	

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Gambaran pelayanan SKPD

Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pehubungan Kabupaten Tegal merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan yang dijabarkan dalam Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

b. Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang Perhubungan, maka sasaran strategis Kementerian Perhubungan

bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
2. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
3. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan dan antarkota.
4. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), terciptanya pola distribusi nasional.
5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
6. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui:
 - a. Desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, pedesaan dan antarkota dalam provinsi;

- b. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota);
 - c. Memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik.
 - 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.
 - 8. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.
 - 9. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten
- Sasaran yang hendak dicapai Dishub Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
- 1. Meningkatnya pelayanan lalu lintas
 - 2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum
 - 3. Meningkatnya mutu SDM di bidang Perhubungan
 - 4. Meningkatkan dan mendayagunakan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.

d. Implementasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan Perencanaan secara komprehensif, yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pembangunan bidang transportasi, dapat dilakukan secara terpadu.

e. Implementasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi potensi timbulnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pemetaan permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Peremajaan Terminal Dukuhsalam dan Adiwerna sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang representatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan	Penguatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah
Peremajaan Traffic Light dalam wilayah Slawi dan Sekitarnya dengan menggunakan system <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> .	
Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan kota termasuk angkutan liar, uji kendaraan bermotor, dan sertifikat serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan	
Pemeliharaan fasilitas Perhubungan	
Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor	Pengelolaan lingkungan hidup

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan kabupaten Tegal yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan
2. Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan
3. Meningkatkan pelayanan perkeretaapian dan pelayaran
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan kabupaten Tegal yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan
2. Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal
3. Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk

menilai pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel T-C.25. sebagai berikut.

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Target Kinerja Tahun		
							2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Pelayanan Urusan lalu Lintas dan Keselamatan Jalan	Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik	Jumlah Sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik dibanding jumlah sarana perhubungan	%	90	90	85	85	85
				Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR dibanding jumlah kendaraan umum wajib uji KIR	%	103.86	103.29	92	93	95
				Persentase retribusi perpajakan	Jumlah realisasi retribusi parkir dibanding jumlah target retribusi parkir	%	15	19	90	90	90
2	Meningkatkan pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Pelayanan Angkutan dan terminal	Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut	jumlah penumpang barang terangkut dibanding jumlah penumpang barang yang masuk terminal	%	100	100	95	95	95
				Persentase AKDP berijin	jumlah AKDP berizin dibanding jumlah AKDP	%	100	100	95	95	95
				Persentase pemungutan retribusi terminal	Jumlah kendaraan yang membayar retribusi terminal dibanding jumlah kendaraan masuk terminal	%	100	91	95	95	95
				Persentase Pembinaan Angkutan Umum	Jumlah realisasi pembinaan dibanding jumlah target pembinaan	%	90	90	90	90	90
				Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	Jumlah pengadaan sarana/prasarana terminal dibanding kebutuhan sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal	%	85	85	85	85	85
3	Meningkatkan pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Pelayanan Perkeretaapian dan Pelayaran	Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Persentase kapal memiliki PAS/berizin	Jumlah kapal memiliki PAS/berizin dibanding jumlah kapal yang harus memiliki PAS	%	-	-	-	80	80
				Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik	Jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dibanding kebutuhan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang	%	80	85	90	90	90
				Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Jumlah perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu dibanding jumlah gardu dan	%	85	85	85	90	90

					palang pintu						
4	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan	Jumlah pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan dibanding jumlah tugas kesekretariatan Dishub	%	91	92	85	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal akan dicapai dalam dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan data pada Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019 dan Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019, menunjukkan bahwa realisasi target prosentase sudah bagus. Untuk itu kebijakan peningkatan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T.C-.26 berikut ini.

T-C.26 Tujuan dan Sasaran Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera				
Misi : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Meningkatkan Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik	Peningkatan Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik
			Meningkatkan Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	Peningkatan Persentase kendaraan umum yang diuji KIR
			Meningkatkan Persentase retribusi perpajakan	Peningkatan Persentase retribusi perpajakan
			Meningkatkan Jumlah pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)	Peningkatan Jumlah pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)
			Meningkatkan jumlah retribusi perpajakan	Peningkatan jumlah retribusi perpajakan
			Meningkatkan jumlah pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (APILL dan LPJU)	Peningkatan jumlah pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (APILL dan LPJU)
			Meningkatkan Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR	Peningkatan Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR
			Meningkatkan Jumlah Retribusi KIR	Peningkatan Jumlah Retribusi KIR
2	Meningkatkan pelayanan di bidang angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan	Meningkatkan Persentase jumlah penumpang/barang	Peningkatan Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut

	dan terminal	terminal	yang terangkut	
			Meningkatkan Persentase AKDP berijin	Peningkatan Persentase AKDP berijin
			Meningkatkan Persentase pemungutan retribusi terminal	Peningkatan Persentase pemungutan retribusi terminal
			Meningkatkan Persentase Pembinaan Angkutan Umum	Peningkatan Persentase Pembinaan Angkutan Umum
			Meningkatkan Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik
			Meningkatkan Jumlah ijin trayek	Peningkatan Jumlah ijin trayek
			Meningkatkan Jumlah pembinaan angkutan umum (orang/barang)	Peningkatan Jumlah pembinaan angkutan umum (orang/barang)
			Meningkatkan Jumlah sarana/prasarana angkutan jalan dalam kondisi baik	Peningkatan Jumlah sarana/prasarana angkutan jalan dalam kondisi baik
			Meningkatkan Jmlh arus penumpang angktn umum yang masuk daerah	Peningkatan Jmlh arus penumpang angktn umum yang masuk daerah
			Meningkatkan Jmlh arus penumpang angktn umum yang keluar daerah	Peningkatan Jmlh arus penumpang angktn umum yang keluar daerah
			Meningkatkan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Peningkatan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

			Meningkatkan Jumlah retribusi terminal	Peningkatan Jumlah retribusi terminal
			Meningkatkan Jumlah sarana/prasarana terminal dalam kondisi baik	Peningkatan Jumlah sarana/prasarana terminal dalam kondisi baik
			Meningkatkan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Peningkatan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu
			Meningkatkan Persentase kapal memiliki PAS/berizin	Peningkatan Persentase kapal memiliki PAS/berizin
			Meningkatkan Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik
3	Meningkatkan pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Meningkatkan jumlah Perlintasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal	Peningkatan jumlah Perlintasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal
			Mengurangi jumlah Perlintasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu	Pengurangan jumlah Perlintasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu
			Meningkatkan jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)	Peningkatan jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)
			meningkatkan prosentase Penutupan perlintasan liar	Peningkatan prosentase Penutupan perlintasan liar
			Meningkatkan Persentase perlintasan KA memiliki gardu	Peningkatan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu

dan palang pintu	
Meningkatkan Persentase kapal memiliki PAS /berizin	Peningkatan Persentase kapal memiliki PAS /berizin
Meningkatkan Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik	Peningkatan Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik
Meningkatkan jumlah Perlintasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal	Peningkatan jumlah Perlintasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal
Mengurangi jumlah Perlintasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu	Pengurangan jumlah Perlintasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu
Meningkarkan jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)	Peningkatan jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)
Meningkatkan jumlah Penutupan perlintasan liar	Peningkatan jumlah Penutupan perlintasan liar
Meningkatkan jumlah Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau	Peningkatan jumlah Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau
Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)	Peningkatan jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)

			Meningkatkan jumlah Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran (Life Jacket dan Ring Buoy)	Peningkatan jumlah Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran (Life Jacket dan Ring Buoy)
4	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memenuhi jumlah surat yang terkirim	Pemenuhan jumlah surat yang terkirim
			Memenuhi jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	Pemenuhan jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar
			Memenuhi jumlah tenaga PTT yang terbayar	Pemenuhan jumlah tenaga PTT yang terbayar
			Memenuhi jumlah alat tulis kantor	Pemenuhan jumlah alat tulis kantor
			Memenuhi jumlah barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan jumlah barang cetakan dan penggandaan
			Memenuhi jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Memenuhi jumlah peralatan rumah tangga	Pemenuhan jumlah peralatan rumah tangga
			Memenuhi jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Memenuhi jumlah makanan dan minuman	Pemenuhan jumlah makanan dan minuman
			Memenuhi jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pemenuhan jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			Memenuhi jumlah perlengkapan gedung dan	Pemenuhan jumlah perlengkapan gedung dan kantor

		kantor	
		Meningkatkan jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Peningkatan jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya
		Memenuhi jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pemenuhan jumlah gedung kantor yang terpelihara
		Memenuhi jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	Pemenuhan jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara
		Memenuhi jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemenuhan jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
		Meningkatkan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
		Memenuhi jumlah pengelola keuangan SKPD	Pemenuhan jumlah pengelola keuangan SKPD
		Memenuhi jumlah penyelenggaraan pameran investasi	Pemenuhan jumlah penyelenggaraan pameran investasi
		Memenuhi Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Pemenuhan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
		Memenuhi Jumlah Penyusunan rancangan dan penetapan renja skpd	Pemenuhan Jumlah Penyusunan rancangan dan penetapan renja skpd
		Memenuhi kegiatan Forum SKPD	Pemenuhan kegiatan Forum SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sesuyai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan/Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program peningkatan pelayanan angkutan
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
11. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
13. Program pembinaan & pengemb.bid. kelistrikan

Indikator kinerja dari keempat program tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel T-C.27. sebagaimana terlampir :

Tabel T.C-27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan (Outcome)	satuan	Target/Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja SKPD Penangung Jawab	Lokasi
								2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
								Realisasi	Rp. (000)	Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan tugas kesekretariat an		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	unit	150	2,275	150	2,498	150	2,500	150	2,500	150	2,500			Dishub	Kab. Tegal
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	bulan	12	358,573	12	437,160	12	330,000	12	225,000	12	250,000			Dishub	Kab. Tegal
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman selama 11 bln	bulan	11	111,344	11	16,874	11	109,114	11	106,000	11	115,000			Dishub	Kab. Tegal
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kegiatan	30	148,889	30	49,025	30	190,330	30	120,000	30	200,000			Dishub	Kab. Tegal

					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (PTT)	Jumlah tenaga PTT yang terbayar	orang	1	29,106	1	39,891	1	20,360	1	21,000	1	25,000			Dishub	Kab. Tegal
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	buah	50	48,028	50	13,800	50	50,000	50	50,000	50	50,000			Dishub	Kab. Tegal
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	buah	20	368,327	20	7,497,500	20	414,000	20	400,000	20	420,000			Dishub	Kab. Tegal
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	15	15,000	15	10,000	15	115,000	15	20,000	15	30,000			Dishub	Kab. Tegal
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	unit	24	7,500	24	10,490	24	7,500	24	7,500	24	7,500			Dishub	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	2	9,150	2	114,999	2	10,000	2	6,500	2	6,500			Dishub	Kab. Tegal
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-														

					Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional (motor)	buah	4	65,952	4	447,988	-	-	-	-	-	-	Dishub	Kab. Tegal
					Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	buah	7	19,653	7	49,854	7	100,000	-	-	-	-	Dishub	Kab. Tegal
					Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	unit	6	48,000	6	1,183,450	-	-	6	65,000	-	75,000	Dishub	Kab. Tegal
					Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	buah	-	-	-	-	9	136,490	0	-	-	-	Dishub	
					Pemasangan Listrik Gedung kantor	jumlah Pemasangan Listrik Gedung kantor	unit	1	98,612	1	69,555	1	-	-	-	1	200,000	Dishub	
					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	49,860	1	133,330	1	351,340	1	360,120	-	390,000	Dishub	Kab. Tegal
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung dan kantor	unit	36	177,606	36	140,665	36	210,000	36	170,000	36	170,000	Dishub	

					Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor	unit	1	112,792	1	23,710	1	25,000	1	25,000	1	25,000			Dishub	Kab. Tegal
					Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	unit	20	15,000	20	23,705	20	25,000	20	25,000	20	25,000			Dishub	Kab. Tegal
					Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji	Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji	unit	1	5,203,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	Kab. Tegal
					Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Menara dan Alat Ukur Radiasi	Jumlah Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Menara dan Alat Ukur Radiasi	unit	1	73,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub	Kab. Tegal
					Penataan Gedung Kantor	Tertatanya Gedung Kantor	unit	-	-	-	-	1	200,000	-	-	1	25,000	-	-	Dishub	
					Rehabilitasi Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor	unit	-	-	-	-	1	200,000	-	-	-	-	-	-	Dishub	
					DED Gedung Kantor	DED Gedung Kantor	unit	-	-	-	-	-	1	75,000	-	-	-	-	-	Dishub	
					Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,000,000	-	-	Dishub	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																

					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	4	26,249	6	41,888	6	70,000	5	30,000	5	75,000			Dishub	Kab. Tegal
					Program Peningkatan Pengembangan/Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan																
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	2	1,750	2	2,740	2	3,358	2	3,500	2	3,500			Dishub	Kab. Tegal
					Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan	orang	5	29,999	5	51,000	5	47,000	5	50,000	5	60,000			Dishub	Kab. Tegal
					Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pengelola barang	orang	2	4,998	2	10,000	-	-	-	-	-	-			Dishub	Kab. Tegal
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah																

					Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	Jumlah dokumen renja	dokumen	1	1,750	1	2,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000			Dishub	
					Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Forum SKPD	kegiatan	1	4,900	1	6,945	1	7,828	1	8,000	1	8,000			Dishub	
					Review DED	Jumlah Review DED	unit	1	48,448	1	-	-	-	-	-	-	-			Dishub	Kab. Tegal
					Review Renstra		dokumen	-	-	-	-	1	12,000	-	-	-	-			Dishub	
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
					Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi	kegiatan	1	10,200	1	10,200	1	10,200	1	10,000	1	12,000			Dishub	
2	Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik															
					Pembangunan Zone Selamat Sekolah (ZOSS)	Meningkatkan keselamatan penyeberang jalan terutama anak sekolah	M2	567	170,000	0	0	170	200,000	0	0	834	250,000			Dishub	Kab. Tegal

			Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																
			Persentase retribusi perparkiran	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Terpeliharaan ya fasilitas lalu lintas jalan (traffic light & warning light (2017 Honor PHL)	paket	1	277,669	1	145,953	1	282,920	1	300,000	1	400,000			Dishub	
				Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharaan ya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (2017 Honor PHL 8 orang)	paket	1	129,003	1	193,420			1	250,000	1	300,000			Dishub	
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase AKDP berijin															
					Persentase kendaraan umum yang diuji KIR (%)															

					Pengamanan dan Pengawasan Hari - Hari Besar Nasional	Monitoring, Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Hari - Hari Besar Nasional dan (Gaji PHL thn 2017)	:	24	35,000	24	30,000	24	120,560	24	150,000	24	200,000			Dishub	Kab. Tegal
					Forum LLAJ	Tersosialisasinya upaya keselamatan lalu Lintas	kegiatan	0	0		0		0	12	75,000	48	100,000			Dishub	
					Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.																
					Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik															
					Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas standar	Peningkatan Fasilitas Keselamatan LLAJ	unit	3	292,144	2	197,727	4	400,000		0	500	500,000			Dishub	
					Pengadaan Marka Jalan	Peningkatan Fasilitas Keselamatan LLAJ	M2	667	200,000	3861	772,167	1334	400,000		0	1,300	400,000			Dishub	

					Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardraill dan Deliniator)	Peningkatan Fasilitas Keselamatan LLAJ	M2	0	-	31	198,396	31	200,000	62	400,000	38	250,000			Dishub	
					Pengadaan Traffic Light	Penggantian Traffic Light Yang Rusak dan Umur Teknis dan Fungsinya Sudah Berkurang Lebih dari 50 %	paket	1	198,200	1	291,941	1	261,900		0	1	300,000			Dishub	
					Pengadaan Warning Light/Lampu Kedip	Peningkatan Fasilitas Keselamatan LLAJ Khususnya Pada Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api Semarang dan Purwokerto	unit	0	-	7	241,834	10	360,000		0	10	400,000			Dishub	
					Pengadaan Cermin Cekung	Keselamatan Lalu Lintas	buah	0	-		0		0	30	200,000	46	300,000			Dishub	
					Pengadaan Paku Jalan	Berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan	buah	660	197,707		0	1334	400,000		600		200,000			Dishub	
					Pengadaan Mobil Hidrolik	Keselamatan Lalu Lintas	buah	0	0		0		0		0	1	2,000,000			Dishub	

					Pengadaan Traffic Cone	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	buah	192	50,000	1038	269,884	0	0		0	1,154	300,000			Dishub	
					Pengadaan Stick cone	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	buah	0	0		0		0		0	500	200,000			Dishub	
					Pengadaan Alat Perlengkapan jalan	Alat Perlengkapan Jalan	paket	1	150,000	1	177,269		0		0		250,000			Dishub	
					Pengadaan Watter Barrier	Terciptanya Keselamatan ,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	buah	38	150,000		0		0		40		200,000			Dishub	
					Pengadaan Atribut Parkir	Terciptanya Keselamatan ,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	paket	0	0		0		0		0	1	250,000			Dishub	
					rambu pendahulu penunjuk jurusan (RPPJ)	Terciptanya Keselamatan ,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	buah	0	0		0		0		0	27	250,000			Dishub	
					deliniator	Terciptanya Keselamatan ,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	buah	0	0		0		0		0	300	300,000			Dishub	

					counter down	Terciptanya Keselamatan ,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	buah	0	0		0		0	20	300,000			Dishub			
					voice horn speaker	Terciptanya Keselamatan ,Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	buah	0	0		0		0	8	100,000			Dishub			
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor																
					Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Gedung PKB	paket	0	-	1	5,000,000	0	0	0	0	0	-	-	Dishub		
					Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Uji Petik PKB	paket	0	0	0	0	0	0	-	-	1	200,000	-	-	Dishub	
					Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Uji Pengujian PKB	paket	1	3,000,000			0	0	0	0	0	-	-	Dishub		
					Program pembinaan & pengemb.bid. kelistrikan																

				Operasional Pemeliharaan LPJU		tahun	0	-	0	0	0	0	0	1	1,500,000	1	2,000,000			Dishub
				Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum		buah	0	-	0	0	0	0	0	294	5,000,000	353	6,000,000			Dishub
3	Meningkatkan pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan																
			Persentase AKDP berijin	Pengadaan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)	Database Bidang Perhubungan Sebagai Dasar Untuk Mengambil Kebijakan	paket	0	0	0	0	0	0	0			1	150,000			Dishub
			Persentase pemungutan retribusi terminal	Pengadaan SIM Angkutan	Tersedianya Database Angkutan Yang Optimal	paket	0	0	-	0	0	0	0		-	1	50,000			Dishub
			Persentase Pembinaan	Pembuatan Papan Informasi Trayek Angkutan	Terciptanya ketertiban trayek angkutan	paket	0	14,655	0	0	0	0	0		-	1	100,000			Dishub

			Angkutan Umum	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan draft KAK perda Perhubungan	Terciptanya kepastian hukum Bidang Transportasi Darat dan Laut	paket	0	0	0	0	1	50,000	0	-	1	150,000		Dishub
			Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	Pembangunan gedung terminal (Dukuhsalam)	Terbangunnya terminal dukuhsalam	paket	0	-	1	9,194,707	0	0	0	0	-	0		Dishub
				Pembangunan gedung terminal (Yomani)	Terbangunnya terminal yomani	paket	0	-	1	49,450	0	0	0	0	-	0		Dishub
				Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Terbangunnya halte bus, taxi	paket	0	-	0	0	0	0	1	200,000	1	300,000		Dishub
				Penataan Lingkungan terminal	Penataan Lingkungan terminal Dukuhsalam dan Adiwerna	paket	0	-	0	0	0	0	2	1,250,000	2	500,000		Dishub
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ														
				Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (Halte)	pemeliharaan Halte kendaraan umum	tahun	0	0	0	0		0	1	50,000	1	50,000		Dishub

					Rehab Pos Retribusi di pos-pos terminal	Rehab Pos Retribusi di pos-pos terminal	tahun	0	0	0	0	0	0	0	1	150,000			Dishub		
					Rehabilitasi/peeliharaan terminal	Penyempurnaan terminal Dukuhsalam	paket	0	0	0	0	1	700,000		0	1	300,000			Dishub	
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase AKDP berijin															
						Prosentase kendaraan umum yang diuji KIR (%)															
					Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ)	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran, Lalu Lintas	siswa	40	23,200	40	22,034	40	30,000	40	35,000	40	50,000			Dishub	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	keg	1	48,949	1	0	1	30,000	1	30,000	11	25,000			Dishub	
					Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	tahun	0	0		0	1	50,000	1	200,000	1	300,000			Dishub	

					Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Penurunan kemacetan dan polusi udara	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
					Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
					Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Keselamatan Lalu Lintas	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
					Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Penurunan jumlah pelanggaran dan kecelakaan	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
					Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub

				Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Keselamatan Lalu Lintas	tahun	0	0	0	0	0	150,000		200,000		300,000			Dishub
				Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Keselamatan Lalu Lintas	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
				Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
				Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub
				Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	tahun	0	0	0	-	0	150,000		200,000		300,000			Dishub

					Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	tahun	0	0	0	0	1	150,000	1	200,000	1	300,000			Dishub	
					Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	tahun	0	0	0	0		150,000		50,000		75,000			Dishub	
					Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tersosialisasi budayanya tertib lalin dan angkutan jalan	tahun	0	0	0	0	1	40,000	1	35,000	1	150,000			Dishub	
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan	tahun	1	10,000		0	1	15,000		20,000		25,000			Dishub	
					Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tertatanya terminal Dukuhsalam dan terminal Adiwerna	tahun	0	0		0		0	1	1,000,000	1	200,000			Dishub	
					Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) di Kab. Tegal	Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat kabupaten Tegal	tahun	40	23,200	40	52,510	40	40,000	40	40,000	40	50,000			Dishub	

					Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	tahun	1	25,000	1	40,000	1	174,100	1	50,000	1	50,000			Dishub	
					Monitoring dan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan	Pengawasan, Penertiban dan Penindakan Pelanggaran Ijin Trayek	tahun	1	48,949	0	0	1	50,000	1	60,000	1	50,000			Dishub	
					Re-Routing Trayek Angkutan Pedesaan yang bersinggungan jalur di terminal Slawi dan Adiwerna	Re-Routing Trayek Angkutan Pedesaan yang bersinggungan jalur di terminal Slawi dan Adiwerna	tahun	0	48,949	0	0	1	50,000	0	0	-	0			Dishub	
					Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Pemeliharaan terminal	tahun	0	0	0	0	0	0	0	1		300,000			Dishub	
					Monitoring dan Pengawasan dan Pendataan Kapal Pelaku Usaha Jasa Pelayaran	Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran, Lalu Lintas	tahun	0	0	0	0	1	15,000		1		300,000			Dishub	

					Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.														Dishub
					Pengadaan Halte	Halte kendaraan umum	buah	0	0	0	2	300,000		2		300,000			Dishub
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah														Dishub
					Mudik Lebaran Bersama Masyarakat		bus	2	29,980	2	29,960,000	3	45,000,000	3	45,000	3	60,000		Dishub
					Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah														
					Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pajak daerah dan PBB	Honor PHL + monitoring PAD dan belanja alat kelengkapan PHL (Tahun 2017 20 PHL)	orang	63	601,445	63	776,401	20	248,480	46	550,000	46	600,000		Dishub
4	Meningkatkan pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Persentase kapal memiliki PAS/berizin		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan														Dishub

			Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Honorarium petugas palang pintu kereta api	orang	40	611,940	81	990,513	97	1,267,980	97	1,597,500	97	2,000,000			Dishub
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik														
			Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan/dermaga	Pemeliharaan pelabuhan/dermaga	tahun	0	0		0		0	1	50,000	1	300,000			Dishub
				Rehabilitasi/pemeliharaan Gardu, Palang Pintu KA, Peralatannya	Terpeliharaan ya gardu, palang pintu KA beserta peralatannya	tahun	0	0	1	55,000	1	55,000	1	70,000	1	200,000			Dishub
				Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.															Dishub
				Pengadaan Alat Komunikasi Gardu KA	Kelancaran Kereta Api	paket	0	0	1	32,108	1	150,000	1	75,000	1	85,000			Dishub

					Pengadaan Rambu-rambu lain pada perlintasan sebidang	Berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan	buah	200	197,641		0		0	150	150,000	200	200,000			Dishub
					Pengadaan Palang Pintu pada Perlintasan Sebidang	Berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan	set	0	0	2	39,500	1	280,000	4	100,000	8	200,000			Dishub
					Pengadaan Gardu Palang Pintu	Berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas di perlintasan KA	unit	0	0	2	159,434	3	190,000	2	150,000	1	60,000			Dishub
					Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran (Life Jacket, Ring Buoy, dll)	Berkurangnya tingkat kecelakaan pelayaran	paket	0	0		0		0	1	200,000	1	200,000			Dishub

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis OPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) OPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD. Naskah rancangan Renstra OPD ini selanjutnya disampaikan kepala OPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut ditabel T.C-28 dibawah ini :

Tabel T-C.28.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Indikator Program (Bab VIII RPJMD)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							
	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	99,61	96,80	75	85	90	100
	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	99,61	99,61	75	85	90	100
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							
	Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	99,17	91,65	75	85	90	100
3	Program peningkatan pelayanan angkutan							
	Persentase AKDP berijin	100%	95%	95	85%	85	90	100
	Prosentase kendaraan umum yang	67.00	103,86	105	58.00	104	179	104.5

	diuji KIR (%)							
4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	78	97,72	98,66	75	90	120	90

BAB VIII

P E N U T U P

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang berisiidentifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2019. Review Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah. Review Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, juga penting komponen masyarakat. Review Renstra ini juga dapat menjadi acuan dalam bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Review Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ABDUL HONI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19600214 198203 1 015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL**

Tupoksi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan keselamatan jalan, angkutan jalan dan terminal, perkeretaapian dan pelayaran;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
- e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

IKU Kepala Dishub

No	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Persentase sarana dan Prasarana perhubungan berfungsi baik	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan, keselamatan dan kelaikan transportasi dibanding Pelayanan di bidang Perhubungan	Survei IKM	Kepala OPD
		Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR dibanding jumlah kendaraan umum wajib uji KIR	laporan dan monev	

IKU Sekretaris

No	Sasaran Renstra/Program RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan di bidang penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum serta pengkoordinasian kebijakan teknis perhubungan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan	Jumlah pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan dibanding jumlah tugas kesekretariatan Dishub	laporan capaian kegiatan	Sekretaris

IKU Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran	laporan capaian kegiatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

IKU Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	dokumen LKJiP	dokumen LKJiP	Capaian Kegiatan dan Anggaran SKPD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Penyusunan rancangan dan penetapan renja skpd	dokumen Renja	dokumen Renja	Capaian Kegiatan /Anggaran SKPD tahun sebelum dan Rencana Kegiatan/Anggaran Tahun berikutnya	
3	Review Renstra	dokumen Review Renstra	dokumen Review Renstra	Dokumen Renstra berjalan dan kegiatan/anggaran sebelum dan yad	
4	Forum SKPD	Forum SKPD	Forum SKPD	Capaian Kegiatan dan Anggaran SKPD tahun sebelum dan Rencana Kegiatan/Anggaran Tahun berikutnya	

5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PTT	Jumlah PTT	Anggaran APBD	
6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Jumlah pelaporan administrasi keuangan OPD	Jumlah pelaporan administrasi keuangan OPD	Anggaran APBD	

IKU Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik	Jumlah Sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik dibanding jumlah sarana perhubungan	laporan dan monev	Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
		Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR dibanding jumlah kendaraan umum wajib uji KIR	laporan dan monev	
		Persentase retribusi perpajakan	Jumlah realisasi retribusi parkir dibanding jumlah target retribusi parkir	laporan, monev dan STS (Surat Tanda Setoran)	

IKU Kasi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Jumlah pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)	Jumlah pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)	laporan dan monev	Kasi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas
		jumlah retribusi perpajakan	jumlah retribusi perpajakan	laporan, monev dan STS (Surat Tanda Setoran)	

IKU Kasi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (APILL dan LPJU)	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (APILL dan LPJU)	laporan dan monev	Kasi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu

		Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR	laporan dan monev	Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor
		Jumlah Retribusi KIR	Jumlah Retribusi KIR	laporan, monev dan STS (Surat Tanda Setoran)	

IKU Kabid Angkutan Jalan dan Terminal

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut	jumlah penumpang barang terangkut dibanding jumlah penumpang barang yang masuk terminal	laporan dan monev	Kabid Angkutan Jalan dan Terminal
		Persentase AKDP berijin	jumlah AKDP berizin dibanding jumlah AKDP	laporan dan monev	
		Persentase pemungutan retribusi terminal	Jumlah kendaraan yang membayar retribusi terminal dibanding jumlah kendaraan masuk terminal	laporan dan monev	
		Persentase Pembinaan Angkutan Umum	Jumlah realisasi pembinaan dibanding jumlah target pembinaan	laporan kegiatan	
		Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	Jumlah pengadaan sarana/prasarana terminal dibanding kebutuhan sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal	laporan dan monev	

IKU Kasi Angkutan Jalan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Jumlah ijin trayek	Jumlah ijin trayek	laporan dan monev	Kasi Angkutan Jalan
		Jumlah pembinaan angkutan umum (orang/barang)	Jumlah pembinaan angkutan umum (orang/barang)	laporan kegiatan	

IKU Kasi Terminal

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Jmlh arus penumpang angktn umum yang masuk daerah	Jmlh arus penumpang angktn umum yang masuk daerah	laporan dan monev	Kasi Terminal
		Jmlh arus penumpang angktn umum yang keluar daerah	Jmlh arus penumpang angktn umum yang keluar daerah	laporan dan monev	
		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	laporan dan monev	
		Jumlah retribusi terminal	Jumlah retribusi terminal	laporan, monev dan STS (Surat Tanda Setoran)	

IKU Kabid Perkeretaapian dan Pelayaran

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Jumlah perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu dibanding jumlah gardu dan palang pintu	laporan dan monev	Kabid Perkeretaapian dan Pelayaran
		Persentase kapal memiliki PAS/berizin	Jumlah kapal memiliki PAS/berizin dibanding jumlah kapal yang harus memiliki PAS	laporan dan monev	
		Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll) dalam kondisi baik	Jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll) dibanding kebutuhan perlengkapan jalan di perlintasan sebidang		

IKU Kasi Perkeretaapian

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
----	----------------------------------	-------------------------	------------	-------------	-----------------

1	Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	jumlah Perlintasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal	jumlah Perlintasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal	laporan dan monev	Kasi Perkeretaapian
		jumlah Perlintasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu	jumlah Perlintasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu	laporan dan monev	
		jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)	jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)	laporan dan monev	
		jumlah Penutupan perlintasan liar	jumlah Penutupan perlintasan liar	laporan dan monev	

IKU Kasi Pelayaran

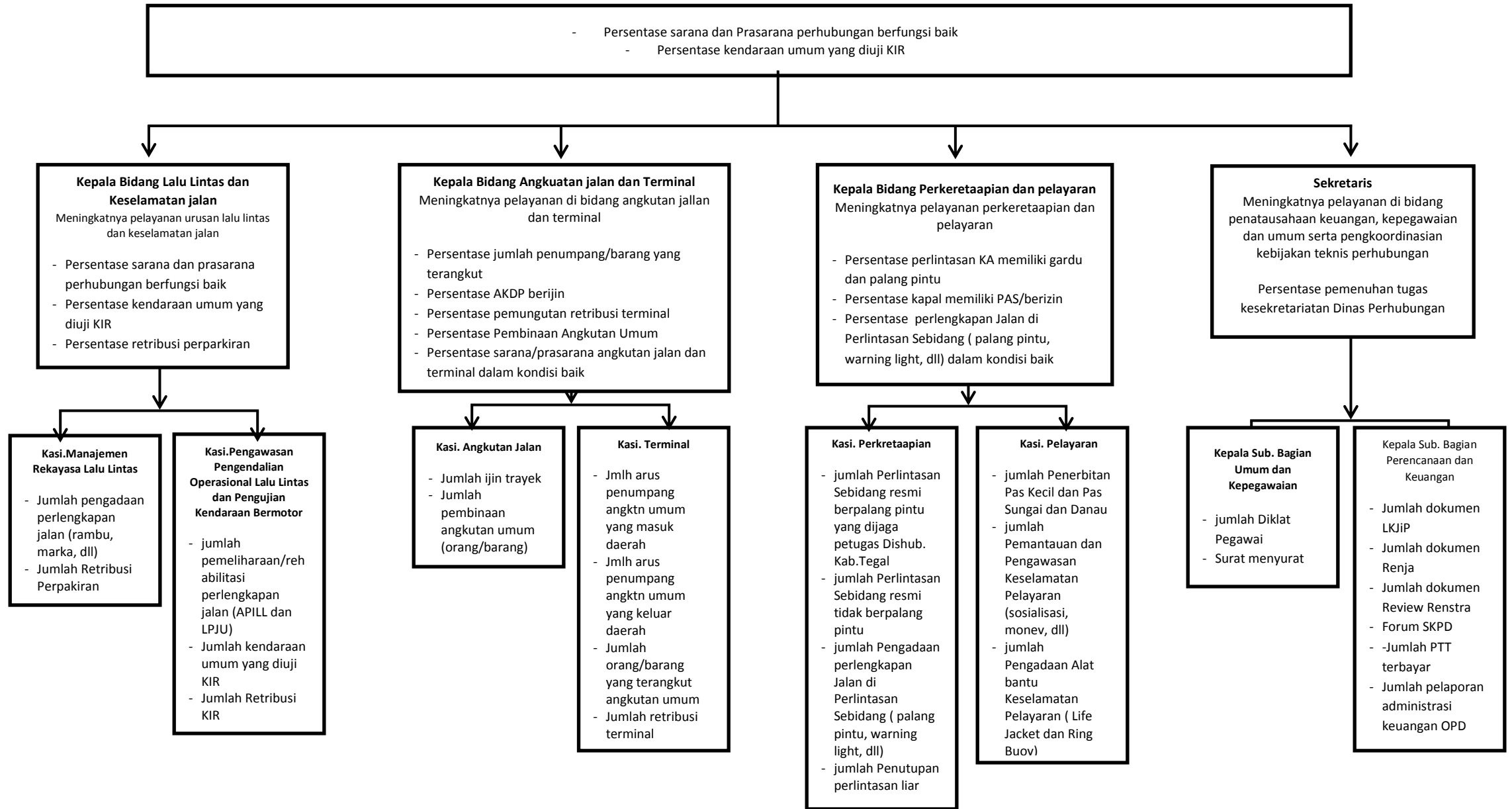
No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Pelayanan Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau	jumlah Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau	jumlah Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau	laporan dan monev	Kasi Pelayaran
2	Peningkatan Keselamatan Pelayaran	jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)	jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)	laporan dan monev	
		jumlah Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran Life Jacket dan Ring Buoy	jumlah Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran Life Jacket dan Ring Buoy	laporan dan monev	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

*** Telah direvisi KEMENPAN & RB

ABDUL HONI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198203 1 015

DINAS PERHUBUNGAN



Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, Faktor pendorong pencapaian misi yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik, good governance, clean government, dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
2. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel;
3. Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk ikut melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kesadaran dan keberanian untuk menyampaikan pengaduan masyarakat
4. Komitmen kuat Bupati dan Wakil Bupati terhadap pencegahan dan pemberantasan KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (kerjasama dengan daerah lain dalam pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan dan anggaran, kerjasama dengan KPK dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Saber Pungli dan TP4D)

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi percepatan pencapaian misi antara lain:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada organisasi perangkat daerah menyebabkan masih tingginya tingkat kecurangan (fraud) yang menyebabkan inekonomis, inefisiensi, inefektifitas, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyebabkan kualitas pelayanan publik belum cukup responsif dan memuaskan.
3. Belum semua perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dasar telah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Belum semua perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik dan mempublikasikan maklumat pelayanannya;
5. Masih rendahnya kesadaran ASN untuk memberikan pelayanan publik yang prima

3.3 Telaahan Renstra BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra BPKP 2015-2019

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015-2019 melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 tentang 2015 Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015-2019. Renstra BPKP 2015-2019. Renstra tersebut menetapkan visi BPKP ke depan yaitu: “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Untuk mencapai visi tersebut, BPKP merumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten;

Dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan dan sasaran, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renstra BPKP 2015-2019	
Tujuan	Sasaran

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Daerah dan Korporasi Kementerian, Lembaga, Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Pemerintah Daerah serta Korporasi

Mencermati rumusan tujuan dan sasaran BPKP tersebut, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan kegiatan penunjang pengawasan terkait langsung dengan tujuan dan sasaran Renstra BPKP 2015-2019. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKP 2015-2019, dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 melalui Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 146.3 Tahun 2014. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Renstra tersebut adalah "Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Mampu Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik di Jawa Tengah". Untuk mencapai visi tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengemban misi sebagai berikut:

1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas;
3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.

Dalam mengemban misinya, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan tiga tujuan dan sasaran, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renstra BPKP 2015-2019	
Tujuan	Sasaran
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah	a. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; b. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif
Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan	Meningkatnya kualitas SDM

intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten	aparapengawasan
Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait	Meningkatnya kualitas koordinasi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.

Melihat tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan pencapaian semua tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Telaahan RTRW dan KHLS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan kegiatan penunjang pengawasan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*, dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Tegal. Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negatif maupun positif perumusan isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Tegal
2. Sistem dan Prosedur Pengawasan
3. Kapasitas SDM APIP
4. Implementasi Teknologi Informasi
5. Maturitas SPIP Perangkat Daerah/Auditan

Pemetaan permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu
<p>Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tegal berdasarkan evaluasi BPKP berada pada level 2 dari 5 level yang ada, yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif;</p>	
<p>Perubahan paradigma APIP dari <i>watchdog</i> ke <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i> dengan pendekatan pencegahan dan sistem peringatan dini belum sepenuhnya berjalan;</p>	
<p>Kewenangan Inspektorat yang luas/besar sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan di seluruh tahapan pembangunan daerah dan setiap lini pemerintahan</p>	<p>(Formulasi Perm</p> <p>menor</p>
<p>Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat APIP (Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah dan BPKP) dan BPK dalam kegiatan penguatan kelembagaan APIP maupun pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;</p>	<p>Kapasitas Kelem</p> <p>Kabupaten Tegal</p>
<p>Jaringan dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dalam pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungutan liar;</p>	
<p>Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan kelembagaan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan intern;</p>	
<p>Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dibandingkan jumlah kebutuhan;</p>	
<p>Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki Kode Etik, Piagam Audit, sistem, prosedur dan pedoman kerja untuk melakukan kegiatan pengawasan;</p>	
<p>Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya memenuhi standar, prosedur, mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun asosiasi profesi;</p>	
<p>Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum sepenuhnya berbasis resiko sehingga belum efektif mengawal pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;</p>	<p>Sistem dan Prose</p>
<p>Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki program pengembangan Zona Integritas;</p>	
<p>Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat;</p>	
<p>Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengendalian gratifikasi</p>	
<p>Belum optimalnya sistem dan mekanisme pengendalian gratifikasi</p>	
<p>Belum optimalnya sistem dan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat</p>	
<p>Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan secara periodik;</p>	
<p>Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki media pembelajaran dan pengembangan kompetensi APIP yaitu Pelatihan di Kantor Sendiri, website (kolom artikel); dan diskusi/rapat-rapat intern;</p>	<p>Kapasitas SDM A</p> <p>kompetensi, prof</p>
<p>Keterbatasan jumlah APIP dibandingkan beban kerja pengawasan/jumlah obyek pemeriksaan menyebabkan kinerja pengawasan yang tidak optimal;</p>	
<p>Keterbatasan kompetensi dan profesionalitas APIP dibandingkan dengan banyak dan kompleksnya materi pengawasan intern</p>	
<p>Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mekanisme pengawasan, pengelolaan database dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan</p>	<p>Implementasi Tel</p>
<p>Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengaduan masyarakat atas</p>	

Permasalahan

Isu

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menyebabkan kualitas pelayanan publik belum cukup responsif dan memuaskan.

Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada organisasi perangkat daerah menyebabkan masih tingginya tingkat kecurangan (fraud) yang menyebabkan inekonomis, inefisiensi, inefektifitas, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

Maturitas SPIP P
Daerah/Auditan

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah turunan dari pernyataan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------|---|--|
| Tujuan 1 | : | Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| Tujuan 2 | : | Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah |
| Tujuan 3 | : | Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| Sasaran 3 | : | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran |

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi
						2015
1	Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini WTP BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kab.Tegal	TMP/ TW/ WDP/ WTP	WDP
2	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Tindaklanjut atas rekomendasi (BPK, BPKP dan Inspektorat) yang terselesaikan dibanding jumlah tindaklanjut	%	65
			Prosentase kasus yang terselesaikan	Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah aduan yang masuk x 100 %	%	100
			Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi seluruh temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal x 100 %	%	65
			Prosentase peningkatan kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah temuan/pelanggaran OPD dibanding jumlah temuan/pelanggaran tahun sebelumnya	%	70
			Jumlah dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	dokumen	3
			Jumlah SKPD yang di Review LKPD	Jumlah SKPD yang di Review LKPD	SKPD	54
			Jumlah SKPD yang di Review RKA	Jumlah SKPD yang di Review RKA	SKPD	54
			Jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar	Jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar	kegiatan	0
			Jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR	Jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR	kasus	3
			Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN	SKPD	-
			Jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)	Jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)	obyek	104
			Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah kasus yang tertangani	%	100
			Jumlah tindaklanjut hasil temuan	Jumlah tindaklanjut hasil temuan	%	65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi	
						2015	
			Jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang (RAKORWAS)	Jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang (RAKORWAS)	kegiatan	4	
			Jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)	Jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)	kegiatan	1	
			Jumlah SKPD yang telah dievaluasi LAKIPnya	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi LAKIPnya	SKPD	54	
			Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas	Jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas	SKPD	2	
			Prosentase pemenuhan tugas kesekretariatan	Jumlah rata-rata capaian output kegiatan	%	90	
			Jumlah dokumen renja	Jumlah dokumen renja	dokumen	1	
			Jumlah dokumen renstra	Jumlah dokumen renstra	dokumen	1	
			3	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	Jumlah surat yang terkirim
			Jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	Jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar	bulan	12	
			Jumlah tenaga PTT yang terbayar	Jumlah tenaga PTT yang terbayar	orang	1	
			Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	jenis	30	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	5	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit	1	
			Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	unit	100	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	126	
			Jumlah makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	orang bulan	1.200	
			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	60	
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat / Tamu	orang bulan	240	
			Jumlah perlengkapan gedung dan kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor	unit	50	
			Jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	unit	30	
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	
			Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	unit	30	
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang	unit	90	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi	
						2015	
			terpelihara	terpelihara			
			Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	31	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD	orang	5	
			Jumlah pengelola website	Jumlah pengelola website (supervisor, admin, reporter)	orang	0	
			Jumlah penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi	kegiatan	1	
			Jumlah auditor yang mendapatkan penilaian angka kredit	Jumlah auditor yang mendapatkan penilaian angka kredit	orang	21	

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tegal akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurunwaktu 5 tahun. Berdasarkan data pada Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019 dan Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019, menunjukkan bahwa realisasi target prosentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan sangat jauh di bawah target, sedangkan prosentase penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu indikator dalam penilaian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu kebijakan peningkatan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan ekstrenal yang ditindaklanjuti perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tegal 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	K
1	Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi WTP	Peningkatann opini Pemerintah Daerah
2	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatkan prosentase kasus yang terselesaikan	Peningkatan jumlah terselesaikan
			Meningkatkan prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Peningkatan jumlah pemeriksaan intern ditindaklanjuti
			Meningkatkan prosentase kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Peningkatan proses terhadap peraturan
			Meningkatkan jumlah dokumen laporan kinerja	Peningkatan jumlah kinerja
			Meningkatkan jumlah SKPD yang di Review LKPD	Peningkatan jumlah LKPD
			Meningkatkan jumlah SKPD yang di Review RKA	Peningkatan jumlah RKA
			Meningkatkan jumlah sosialisasi pencegahan tindakan pungutan liar	Peningkatan jumlah tindakan pungutan
			Meningkatkan jumlah kerugian daerah yang tertangani oleh Majelis TP-TGR	Peningkatan jumlah tertangani oleh Maj
			Meningkatkan jumlah SKPD yang telah melaksanakan Verifikasi LHKASN	Peningkatan jumlah melaksanakan Ver
			Meningkatkan jumlah Pemeriksaan Reguler (Pengawasan Internal secara berkala)	Peningkatan jumlah (Pengawasan Inter
			Meningkatkan jumlah kasus yang tertangani	Peningkatan jumlah
			Meningkatkan jumlah tindaklanjut hasil temuan	Peningkatan jumlah temuan
			Memenuhi jumlah pelaksanaan Rapat pengawasan yang (RAKORWAS)	Pemenuhan jumlah pengawasan yang
			Memenuhi jumlah Rapat pengawasan daerah (LARWASDA)	Pemenuhan jumlah daerah (LARWASDA)
			Memenuhi jumlah SKPD yang telah dievaliasi LAKIPnya	Pemenuhan jumlah dievaliasi LAKIPnya
Memenuhi jumlah SKPD yang menerapkan Zona Integritas	Pemenuhan jumlah Zona Integritas			
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memenuhi pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan jumlah
				Pemenuhan jumlah telpon yang terbayar
				Pemenuhan jumlah terbayar
				Pemenuhan jumlah
				Pemenuhan jumlah penggandaan listrik/penerangan b

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	K
				Pemenuhan jumlah
				Pemenuhan jumlah peraturan perundang
				Pemenuhan jumlah
				Pemenuhan jumlah dan konsultasi ke lu
				Pemenuhan jumlah Rapat / Tamu
				Pemenuhan jumlah dan kantor
				Peningkatan jumlah printer dan pereng
				Pemenuhan jumlah terpelihara
				Pemenuhan jumlah dinas/oprasional ya
				Pemenuhan jumlah kantor yang terpelih
				Peningkatan jumlah pendidikan dan pel
				Pemenuhan jumlah SKPD
				Peningkatan jumlah
				Pemenuhan jumlah pameran investasi
				Peningkatan jumlah mendapatkan penil

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Indikator kinerja dari ketiga program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagaimana terlampir.

Dalam Review Renstra Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 terdapat 9 Program dan 45 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.2. terlampir.

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” pada tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dalam misi “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi”

Untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Tegal hingga tahun 2019. Penilaian capaian kinerja difokuskan pada 3 program utama yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Salah satu indikator kinerja yang harus menjadi perhatian utama Inspektorat Kabupaten Tegal adalah capaian prosentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang pada tahun 2015 dan 2016 masih jauh di bawah target, sedangkan prosentase penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu indikator dalam penilaian opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator kunci pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rumusan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tegal Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Target Kinerja Sesuai Tugas Fungsi PD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi		Target	
			2015	2016	2017	2018
Indikator Sasaran (Bab V RPJMD)						
1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	104	104	86	128	136
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	85	65	49	92	93
3	Opini WTP BPK	WDP	WDP*	WTP	WTP	WTP
Indikator Program (Bab VIII RPJMD)						
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						
1	Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	104	104	86	128	136
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	85	65	49	92	93
3	Opini WTP BPK	WDP	WDP*	WTP	WTP	WTP
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						
4	Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	17	20	47	30	25
5	Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	2	2	12	4	4
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						
6	Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	3	4	5	5	5

BAB VII PENUTUP

Review Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2019. Review Renstra disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk dan susunan perangkat daerah. Review Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, mitra audit, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat. Review Renstra ini juga dapat menjadi acuan dalam bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi. Akhir kata semoga dokumen Review Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Inspektorat Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014–2019.

Kinerja Pelayanan OPD

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik
2. Meningkatnya kendaraan umum yang diuji KIR
3. Meningkatnya Retribusi perparkiran

4. Meningkatnya jumlah penumpang/barang yang terangkut
5. Meningkatnya AKDP berijin
6. Meningkatnya pemungutan retribusi terminal
7. Meningkatnya Pelayanan Angkutan
8. Meningkatnya sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik
9. Meningkatnya perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu
10. Meningkatnya kapal memiliki PAS/berizin
11. Meningkatnya perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik
12. Meningkatnya pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan
13. Meningkatnya SDM di bidang Perhubungan (SDM Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir)

Adapun target yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik
2. Meningkatkan kendaraan umum yang diuji KIR
3. Meningkatkan Retribusi perparkiran
4. Meningkatkan jumlah penumpang/barang yang terangkut
5. Meningkatkan AKDP berijin
6. Meningkatkan pemungutan retribusi terminal
7. Meningkatkan Pelayanan Angkutan
8. Meningkatkan sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik
9. Meningkatkan perlintasan KA yang memiliki gardu dan palang pintu
10. Meningkatkan kapal memiliki PAS/berizin
11. Meningkatkan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik
12. Meningkatkan pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan
13. Meningkatkan SDM di bidang Perhubungan (SDM Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir,dll).

Gambaran kinerja pelayanan SKPD selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

a. Sekretariat

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Rencana tingkat capaian kinerja SKPD pada Sekretariat

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja
		Tahun 2014 s.d tahun 2019
1	Pelayanan surat menyurat	Pengiriman surat menyurat sejumlah 1.500 surat
2	Pelayanan kepegawaian	Penanganan bidang kepegawaian untuk 150 karyawan
3	Pelayanan keuangan	Kelancaran bidang keuangan untuk kegiatan

b. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Rencana tingkat capaian kinerja Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja
		Tahun 2014 s.d tahun 2019
1	Pengadaan perlengkapan jalan dan LPJU (rambu, marka, dll) meningkat	Jumlah pengadaan perlengkapan jalan dan LPJU (rambu, marka, dll)
2	Retribusi perpajakan meningkat	jumlah retribusi perpajakan
3	Pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (APILL dan LPJU) meningkat	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (APILL dan LPJU)
4	Kendaraan umum yang diuji KIR meningkat	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR
5	Retribusi KIR meningkat	Jumlah Retribusi KIR

c. Bidang Angkutan jalan dan Terminal

Gambaran kinerja pelayanan Bidang Angkutan Jalan dan Terminal selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Rencana tingkat capaian kinerja Bidang Angkutan Jalan dan Terminal:

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja
		Tahun 2014 s.d tahun 2019
1	Meningkatkan jumlah penumpang/barang yang terangkut	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
2	Meningkatkan AKDP berijin	AKDP berijin
3	Meningkatkan pemungutan retribusi terminal	Jumlah retribusi terminal
4	Meningkatkan Pelayanan Angkutan	Jmlh arus penumpang angktn umum yang masuk daerah
5	Meningkatkan sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	Jumlah sarana/prasarana terminal dalam kondisi baik

d. Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4

Rencana tingkat capaian kinerja OPD pada Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran

No	Indikator kinerja	Capaian kinerja
		Tahun 2014 s.d tahun 2019
1	Perlntasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal meningkat	jumlah Perlntasan Sebidang resmi berpalang pintu yang dijaga petugas Dishub. Kab.Tegal
2	Perlntasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu menurun	jumlah Perlntasan Sebidang resmi tidak berpalang pintu menurun

3	Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll) dalam kondisi baik	jumlah Pengadaan perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (palang pintu, warning light, dll)
4	Penutupan perlintasan liar meningkat	jumlah Penutupan perlintasan liar
5	Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau danau	jumlah Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau
6	Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)	jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)
7	Alat bantu Keselamatan Pelayaran dalam kondisi baik (life jacket dan Ring Buoy, dll)	jumlah Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran (life jacket, Ring buoy, dll)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan permasalahan utama di Dinas Perhubungan dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan jasa transportasi;
- b. Terbatasnya jumlah SDM transportasi yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya;
- c. Perkembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi;
- d. Human error, merupakan faktor dominan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan OPD adalah sebagai berikut :

- d. Tersedianya landasan hukum Undang - Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. Tersedianya landasan hukum Perda Kab. Tegal No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

f. Tersedianya Sarana dan Fasilitas Perhubungan.

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Sasaran strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu:

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pemerintahan dan perhubungan
3. Penyuluhan keselamatan Lalu lintas
4. Pengadaan papan stiker tryek pada angkutan umum
5. Penyelenggaran angkutan lebaran
6. Pengadaan shelter
7. Pengelolaan sarana terminal,
8. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan
9. Pengadaan Rambu- rambu lalin
10. Pengadaan Marka Jalan
11. Pembangunan Gedung Lab Uji
12. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
13. Pengadaan APILL
14. Pengadaan Trafic Cone
15. Pengadaan Delinator
16. Pengadaan Counter Down
17. Pengadaan Controller
18. Pengadaan Flashing Lamp
19. Pengadaan Shelter
20. Pengadaan Alat Kelengkapan Parkir
21. Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang
22. Pengadaan Rambu Fortable
23. Pengadaan Barrier
24. Pengadaan Mobil Derek
25. Pengadaan Perahu Karet
26. Pengadaan Motor Tempel SAR
27. Pembangunan Terminal Peningkatan sarpras Terminal

28. Perbaikan Alat Uji Kendaraan
29. Penyusunan Rencana Umum Transportasi dan Database Manajemen perhubungan
30. Pembuatan, pengelolaan, pengembangan database berbasis web

Arah kebijakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mendayagunakan kewenangan yang dimiliki untuk mentertibkan Lalu Lintas.
- b. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemampuan dalam mentertibkan Lalu Lintas.
- c. Menggunakan dana yang tersedia secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan dalam mentertibkan Lalu Lintas.
- d. Mengoptimalkan kemampuan dalam menangani kecelakaan untuk mengantisipasi setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Sasaran strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu:

14. Tersedianya sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
15. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pemerintahan dan perhubungan
16. Penyuluhan keselamatan Lalu lintas
17. Pengadaan papan stiker tryek pada angkutan umum
18. Penyelenggaraan angkutan lebaran
19. Pengadaan shelter
20. Pengelolaan sarana terminal,
21. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan
22. Pengadaan Rambu- rambu lalin

23. Pengadaan Marka Jalan
24. Pembangunan Gedung Lab Uji
25. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
26. Pengadaan APILL
27. Pengadaan Traffic Cone
28. Pengadaan Delinator
29. Pengadaan Counter Down
30. Pengadaan Controller
31. Pengadaan Flashing Lamp
32. Pengadaan Shelter
33. Pengadaan Alat Kelengkapan Parkir
34. Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang
35. Pengadaan Rambu Fortable
36. Pengadaan Barrier
37. Pengadaan Mobil Derek
38. Pengadaan Perahu Karet
39. Pengadaan Motor Tempel SAR
40. Pembangunan Terminal Peningkatan sarpras Terminal
41. Perbaikan Alat Uji Kendaraan
42. Penyusunan Rencana Umum Transportasi dan Database Manajemen perhubungan

Arah kebijakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai berikut :

- e. Mendayagunakan kewenangan yang dimiliki untuk menertibkan Lalu Lintas.
- f. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemampuan dalam menertibkan Lalu Lintas.
- g. Menggunakan dana yang tersedia secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kemampuan dalam menertibkan Lalu Lintas.
- h. Mengoptimalkan kemampuan dalam menangani kecelakaan untuk mengantisipasi setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah Izin Trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Jumlah angkutan umum terus meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dimana pada tahun 2009 jumlah angkutan umum sebanyak 1.195 unit, meningkat menjadi 2.901 unit pada tahun 2013. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 126 izin. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012). Data lengkap tentang jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2.43.

Rasio Izin Trayek di Kabupaten Tegal

Tahun	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
2009 - 2013						
No.						
1.	Jumlah Angkutan Umum	1.195	1.782	1.960	2.012	2.901
2.	Jumlah Izin Trayek	58	58	132	124	126

c. Kebijakan

Kebijakan yang ingin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu:

1. Peningkatan pelayanan aparatur dan administrasi perkantoran
2. Penegakan Hukum di Jalan Raya
3. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana angkutan umum
4. Meningkatkan penelitian dan studi terhadap pelayanan angkutan penumpang umum
5. Meningkatkan pelatihan SDM Perhubungan

6. Meningkatkan operasional sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
7. Tersedianya Rencana Umum Transportasi dan Database Manajemen Perhubungan

d. Program

Program yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu:

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program Peningkatan disiplin aparatur
3. Program Pelayanan administrasi perkantoran
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
10. Program peningkatan pelayanan angkutan
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
12. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
13. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor